

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan antar desa di Indonesia belum merata. Terbukti masih adanya desa dalam status desa tertinggal, desa yang sedang berkembang, sampai dengan desa mandiri. Gradasi klasifikasi desa tersebut sangat terlihat. Beberapa hal yang mendasarinya adalah karena masih adanya beberapa isu strategis dalam pembangunan desa. Isu strategis tersebut berkontribusi besar terhadap permasalahan pelayanan di desa diantaranya:

1. Masih tingginya keterisolasian daerah perdesaan;
2. Keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan;
3. Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung produktivitas perdesaan;
4. Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa;
5. Berkurangnya lahan usaha untuk kemandirian desa;
6. Kerentanan sumber daya alam dan lingkungan hidup perdesaan;
7. Belum optimalnya peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa;
8. IPD mengklasifikasikan jumlah desa tertinggal sebanyak 19.944 desa (26,92 %), desa berkembang sebanyak 51.127 desa (69 %), dan desa mandiri sebanyak 3.022 desa (4,08 %).

Isu strategis dimaksud tentunya juga berkontribusi terhadap permasalahan pelayanan di desa, terutama pelayanan publik kepada masyarakat desa, apalagi dengan cairnya dana desa yang jumlahnya besar. Beberapa permasalahan pelayanan publik yang dihadapi oleh pemerintahan desa antara lain:

1. Sebagian besar bahkan hampir seluruh pelayanan publik di desa berupa pemberian rekomendasi (pengantar) yang proses penyelesaiannya berada pada tingkat kecamatan dan dinas terkait. Tidak ada pelayanan publik yang selesai di desa, sifatnya hanya sebagai pengantar. Misalnya pengantar pembuatan KTP, KK, ijin usaha, surat keterangan kelahiran, dan lain-lain.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administratif dalam pengurusan kegiatan tertentu, misalnya dalam pembuatan KTP. Padahal persyaratan tersebut sudah terinformasikan di Ketua RT masing-masing atau bahkan terpasang di Balai Desa. Terkadang juga masyarakat enggan untuk mengurus sendiri karena birokrasi yang panjang dan bertele-tele, sehingga memakan waktu yang lama.
3. Masih banyaknya administrasi desa yang bersifat manual, belum di-back up dengan teknologi informasi. Beberapa tempat masih mengandalkan administrasi menggunakan buku atau tulisan di papan sehingga belum terdokumentasikan dengan baik.
4. Sulitnya mengakomodir seluruh keinginan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dengan anggaran yang besar, maka memunculkan banyaknya tarik ulur dalam penentuan program, sehingga akan ada keinginan masyarakat yang tidak terakomodir.

5. Keterbatasan sarana dan prasarana desa. Keterbatasan ini yang memunculkan minimnya sarana prasarana pelayanan publik yang ditujukan untuk masyarakat desa.
6. Rendahnya kapasitas SDM kepala desa dan perangkat desa. Kompetensi kepala desa menjadi ujung tombak maju atau mundurnya sebuah desa. Permasalahan di sini adalah masih jaranginya kepala desa yang kompeten. Sebagai informasi awal, gambaran mengenai kualitas SDM aparatur desa dari sisi tingkat pendidikan dapat diklasifikasikan pada gambar di bawah:

Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut di atas memberikan informasi bahwa dari sisi tingkat pendidikan, ada sebanyak 829 kepala desa/lurah yang tidak pernah sekolah. Ini menjadi fakta yang tidak bisa terelakkan. Kemungkinan besar kepala desa/lurah yang bersangkutan bisa memimpin tetapi dari sisi kecakapan dalam administratif lain, kemampuan menghasilkan ide-ide tentu akan berbeda dengan kepala desa yang berpendidikan minimal SMP atau sederajat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Menjadi pekerjaan rumah bersama untuk Membangun Indonesia dari Pinggiran bahwa penguatan kapasitas dan kelembagaan di tingkat desa dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Tugas pendamping desa dalam pemanfaatan dana desa utamanya bagi pelayanan desa juga dipentingkan agar pelayanan di tingkat desa menjadi lebih optimal. Maka berdasarkan hal tersebutlah penulis memilih judul "*peranan kepala desa dalam pengelolaan dana desa*". **Penulis ingin membahas tentang peranan kepala desa dalam**

pengelolaan dana desa, sehingga tercipta tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis berdasarkan hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan diatas, maka ditemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam pengelolaan dana desa ?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa ?

C. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. MANFAAT TEORITIS

- a. Memberi masukan dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara, dalam hal ini pengelolaan dana desa .
- b. Menambah sumber bacaan dan sumber acuan bagi masyarakat dalam mempelajari tentang Pemerintahan Desa.

2. MANFAAT PRAKTIS

Secara praktis penelitian ini berguna untuk memberi masukan kepada masyarakat dan mahasiswa yang mempelajari ilmu hukum serta pihak – pihak yang berkepentingan dalam

menerapkan hukum (tata negara) serta undang – undang secara baik dan benar.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan tentang tata negara dalam hal ini mengenai peran dan fungsi kepala desa atas pemerintahan desa ;

Yang menjadi tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa dalam pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi sistem pengelolaan dana desa.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, kemudian dalam tiap bab terbagi lagi kedalam sub bab, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penguraian dan pembahasannya dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Mencakup tentang materi skripsi serta persoalan yang hendak dibahas yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA

Dalam bab ini memuat uraian tentang pengertian peranan, tinjauan pemerintah desa, Ciri-Ciri Desa, syarat pembentukan desa, tata cara pembentukan desa, pengertian kepala desa.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, cara pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari yang mencakup tentang kesimpulan dari materi yang disampaikan serta saran – saran terhadap materi skripsi ini.